📜 PANCASILA DALAM SEJARAH

🔹 I. Pengertian dan Asal-usul Pancasila

Pancasila adalah dasar filsafat negara (philosophische grondslag) dan ideologi bangsa Indonesia, yang berfungsi sebagai pandangan hidup, sumber hukum, dan cita-cita moral bangsa.

Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta:

Panca berarti lima, Sila berarti dasar, asas, atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti lima dasar atau lima asas yang menjadi pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

🔹 II. Proses Lahirnya Pancasila

Perumusan Pancasila tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang selama masa perjuangan kemerdekaan. Berikut tahapan-tahapan pentingnya:

1. Masa Pra-Kemerdekaan

Sebelum Pancasila dirumuskan secara resmi, nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia.

Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, keadilan, dan religiusitas sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Nusantara.

Artinya, Pancasila bukan hasil adopsi dari bangsa lain, melainkan digali dari kepribadian bangsa sendiri.

2. Pembentukan BPUPKI

Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Cosakai yang dibentuk pada 29 April 1945, yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat

BPUPKI bertugas menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia merdeka, termasuk dasar negara.

Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)

Sidang pertama membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka.

Dalam sidang ini, muncul tiga tokoh penting yang memberikan gagasannya:

a. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Menyampaikan pidato lisan dan tertulis mengenai dasar negara.

Rumusan tertulis (5 asas):

- Peri Kebangsaan
- Peri Kemanusiaan
- Peri Ketuhanan
- Peri Kerakyatan
- Kesejahteraan Rakyat

Ia menekankan pentingnya persatuan dan kedaulatan rakyat.

b. Soepomo (31 Mei 1945)

Menyampaikan gagasan negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh rakyat tanpa mengutamakan kepentingan individu atau golongan.

Tidak secara eksplisit menyebut “Pancasila”, namun menekankan:

- Persatuan
- Kekeluargaan
- Musyawarah
- Keadilan sosial
- Ketuhanan

c. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Dalam pidato bersejarahnya, Soekarno memperkenalkan istilah “Pancasila”.

Lima asas menurut Soekarno:

- Kebangsaan Indonesia
- Internasionalisme atau perikemanusiaan
- Mufakat atau demokrasi
- Kesejahteraan sosial
- Ketuhanan yang berkebudayaan

Soekarno menjelaskan bahwa kelima sila itu dapat diperas menjadi *Trisila* (Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, Ketuhanan), bahkan menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong.

3. Pembentukan Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia Sembilan, terdiri dari:

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moh. Hatta
3. Mr. A. A. Maramis
4. Mr. Muhammad Yamin
5. Mr. Achmad Subardjo
6. K.H. Wahid Hasyim
7. Abikusno Tjokrosujoso
8. Agus Salim
9. Abdul Kahar Muzakir

Panitia ini merumuskan Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yang merupakan hasil kompromi antara golongan nasionalis dan Islam.

Isi Piagam Jakarta (22 Juni 1945):

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Piagam ini menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945.

4. Sidang Kedua BPUPKI (10–16 Juli 1945)

Sidang ini membahas rancangan UUD 1945, dengan Piagam Jakarta dijadikan dasar dari Pembukaan UUD.

Pada akhir sidang, BPUPKI berhasil merancang:

Pembukaan UUD (berdasarkan Piagam Jakarta)

Batang tubuh UUD

Wilayah negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan

5. Pembentukan PPKI dan Penetapan Pancasila (18 Agustus 1945)

Setelah proklamasi kemerdekaan (17 Agustus 1945), dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, PPKI:

- Mengesahkan UUD 1945
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden

- Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Namun sebelum pengesahan, dilakukan perubahan penting:

→ Sila pertama Piagam Jakarta diubah dari

“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

menjadi

“Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan mengakomodasi seluruh golongan non-Muslim di Indonesia Timur.

Hasil akhir rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan ini resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia.

□□ III. Pancasila dalam Perjalanan Sejarah Bangsa Indonesia

1. Periode 1945–1949

Masa awal kemerdekaan.

Pancasila dijadikan dasar negara yang resmi.

Namun kondisi politik dan keamanan belum stabil karena perang mempertahankan kemerdekaan.

2. Periode 1950–1959 (Demokrasi Liberal)

Berlaku UUD Sementara 1950.

Nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan karena adanya konflik politik dan kepentingan partai-partai.

Ideologi bangsa sempat terpecah, muncul berbagai pemberontakan (DI/TII, PRRI, Permesta).

3. Periode 1959–1965 (Demokrasi Terpimpin)

Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945.

Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara.

Namun, penafsiran Pancasila saat itu sering disesuaikan dengan kepentingan politik penguasa (nasakom: nasionalisme, agama, komunisme).

4. Periode 1966–1998 (Orde Baru)

Pemerintahan Soeharto menegaskan Pancasila sebagai ideologi tunggal bangsa.

Dibentuk program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Nilai-nilai Pancasila diajarkan di semua jenjang pendidikan dan lembaga.

Namun, pelaksanaannya sering bersifat formalistik dan tidak kritis terhadap kekuasaan.

5. Periode 1998–Sekarang (Reformasi dan Pasca Reformasi)

Setelah jatuhnya Soeharto, Pancasila tidak lagi dijadikan ideologi tunggal secara paksa.

Muncul tantangan baru: melemahnya penghayatan nilai-nilai Pancasila, meningkatnya konflik sosial dan intoleransi.

Pemerintah kembali memperkuat pemahaman Pancasila, antara lain melalui pembentukan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) pada tahun 2017.

□ IV. Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Sebagai Dasar Negara

Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, seluruh peraturan dan kebijakan harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Sebagai Ideologi Bangsa

Pancasila menjadi cita-cita bersama dan pedoman moral dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sebagai Pandangan Hidup Bangsa (Weltanschauung)

Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bertingkah laku dan berinteraksi sosial.

Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Nasional

Semua hukum dan peraturan di Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

V. Nilai-nilai Pancasila

Sila Nilai Pokok Makna Utama

1. Ketuhanan Yang Maha Esa Religiusitas, toleransi Mengakui dan menghormati keberagaman agama

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan, keadilan Menghargai hak asasi manusia, memperlakukan manusia secara bermartabat

3. Persatuan Indonesia Nasionalisme, cinta tanah air Menjaga persatuan di tengah keberagaman

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Demokrasi, musyawarah Mengutamakan mufakat, menghargai perwakilan rakyat

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Keadilan, kesejahteraan Pemerataan hasil pembangunan, menolak kesenjangan sosial

VI. Tantangan Pancasila di Era Globalisasi

Pengaruh budaya asing dan individualisme.

Lunturnya semangat gotong royong dan nasionalisme.

Meningkatnya radikalisme dan intoleransi.

Kesenjangan sosial ekonomi.

Penyalahgunaan teknologi informasi.

Upaya mengatasinya antara lain:

Penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila.

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Revitalisasi lembaga pembinaan ideologi seperti BPIP.

VII. Kesimpulan

Pancasila merupakan hasil perjuangan dan pemikiran luhur para pendiri bangsa yang menggali nilai-nilai dari budaya bangsa sendiri.

Sejak 1 Juni 1945 hingga sekarang, Pancasila tetap menjadi dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Tugas generasi sekarang adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kemanusiaan di Indonesia.